

**DJKN**



**Laporan**

# **KEUANGAN**

**Tahunan Tahun Anggaran 2025  
(Audited)**

**KAILI**  
Kami Ikhlas  
Melayani



Jl. Prof. Moh. Yamin No.55,  
Tatura Utara, Palu Selatan,  
Kota Palu, Central Sulawesi 94111



[kpknipalu@kemenkeu.go.id](mailto:kpknipalu@kemenkeu.go.id)



(0451) 8202737  
0811 - 4560 - 4630 (WA)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Palu, 04 Mei 2026**

**Plt. Kepala Kantor,**



Ditandatangani secara elektronik

**Awalludin Ikhwan**

**NIP 198010262002121001**

## DAFTAR ISI

|                                                       | Hal |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar                                        | i   |
| Daftar Isi                                            | ii  |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             | iii |
| Ringkasan                                             | 1   |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                         | 3   |
| II. Neraca                                            | 4   |
| III. Laporan Operasional                              | 5   |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                         | 6   |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                      | 7   |
| A. Penjelasan Umum                                    | 7   |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 20  |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca                     | 25  |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional        | 31  |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas  | 36  |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | 38  |
| VI. Lampiran                                          |     |



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 55 Palu 94117  
TELEPON (0451), SUREL: KPKNLPALU@KEMENKEU.GO.ID

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Palu, 04 Mei 2026**

**Plt. Kepala Kantor,**



Ditandatangani secara elektronik

**Awalludin Ikhwan**

**NIP 198010262002121001**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Tahun Anggaran 2025 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.131.859.422 atau mencapai 107,12% dari estimasi pendapatan sebesar Rp5.724.300.000.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.429.049.445 atau mencapai 85,26% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.848.982.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp42.966.709.934 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp18.653.078 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp42.948.056.856 serta Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.296.450 dan Rp42.965.413.484.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.124.307.422 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.681.619.071 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.442.688.351 sedangkan jumlah surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp2.612.000, sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp3.445.300.351.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp42.766.193.170 ditambah Surplus-LO sebesar Rp3.445.300.351 dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp0 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp3.246.080.037) sehingga didapatkan Penurunan Ekuitas sebesar Rp199.220.314 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp42.965.413.484.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                        | CATATAN | 2025                 |                      | % thd<br>Angg | 2024                 |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                               |         | ANGGARAN             | REALISASI            |               | REALISASI            |
| <b>PENDAPATAN</b>             |         |                      |                      |               |                      |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1     | 5.724.300.000        | 6.131.859.422        | 107,12        | 4.791.715.268        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>      |         | 5.724.300.000        | <b>6.131.859.422</b> | <b>107,12</b> | 4.791.715.268        |
| <b>BELANJA</b>                |         |                      |                      |               |                      |
| <b>Belanja Negara</b>         |         |                      |                      |               |                      |
| Belanja Pegawai               | B.2     | 0                    | 0                    | 0             | 0                    |
| Belanja Barang                | B.3     | 2.421.592.000        | 2.017.111.532        | 83,30         | 2.328.687.759        |
| Belanja Modal                 | B.4     | 427.390.000          | 411.937.913          | 96,38         | 585.069.000          |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b> |         | <b>2.848.982.000</b> | <b>2.429.049.445</b> | <b>85,26</b>  | <b>2.913.756.759</b> |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>         |         | <b>2.848.982.000</b> | <b>2.429.049.445</b> | <b>85,26</b>  | <b>2.913.756.759</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                       | CATATAN | 2025                  | 2024                  |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>                                  |         |                       |                       |
| <b>ASET LANCAR</b>                           |         |                       |                       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                 | C.1     | 0                     | 0                     |
| Kas di Bendahara Penerimaan                  | C.2     | 0                     | 0                     |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                   | C.3     | 1.296.450             | 18.020.787            |
| Pendapatan Yang Masih Harus Diterima         | C.4     | 0                     | 0                     |
| Persediaan                                   | C.5     | 17.356.628            | 1.234.341             |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                    |         | <b>18.653.078</b>     | <b>19.255.128</b>     |
| <b>ASET TETAP</b>                            |         |                       |                       |
| Tanah                                        | C.6     | 33.222.197.500        | 33.222.197.500        |
| Peralatan dan Mesin                          | C.7     | 5.065.338.743         | 4.540.521.549         |
| Gedung dan Bangunan                          | C.8     | 9.804.889.588         | 9.880.225.979         |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                  | C.9     | 209.936.000           | 209.936.000           |
| Aset Tetap Lainnya                           | C.10    | 0                     | 4.940.000             |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                  | C.11    | 0                     | 0                     |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap              | C.12    | (5.354.304.975)       | (5.078.182.848)       |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                     |         | <b>42.948.056.856</b> | <b>42.779.638.180</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          |         |                       |                       |
| Aset Lain-lain                               | C.13    | 0                     | 267.945.000           |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.14    | 0                     | (267.945.000)         |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya             | C.15    | 0                     | 0                     |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                   |         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           |         | <b>42.966.709.934</b> | <b>42.798.893.308</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                             |         |                       |                       |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               |         |                       |                       |
| Utang kepada Pihak Ketiga                    | C.16    | 1.296.450             | 32.700.138            |
| Utang Yang Belum Ditagihkan                  | C.17    | 0                     | 0                     |
| Uang Muka dari KPPN                          | C.18    | 0                     | 0                     |
| Utang jangka pendek lainnya                  | C.19    | 0                     | 0                     |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>        |         | <b>1.296.450</b>      | <b>32,700,138</b>     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                      |         | <b>1.296.450</b>      | <b>32,700,138</b>     |
| <b>EKUITAS</b>                               |         |                       |                       |
| Ekuitas                                      | C.20    | 42.965.413.484        | 42.766.193.170        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        |         | <b>42.965.413.484</b> | <b>42.766.193.170</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>          |         | <b>42.966.709.934</b> | <b>42.798.893.308</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                | CATATAN | 2025                 | 2024                 |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                           |         |                      |                      |
| <b>PENDAPATAN</b>                                     |         |                      |                      |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                         | D.1     | 6.124.307.422        | 4.759.611.064        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                              |         | 6.124.307.422        | 4.759.611.064        |
| <b>BEBAN</b>                                          |         |                      |                      |
| Beban Pegawai                                         | D.2     | 0                    | 0                    |
| Beban Persediaan                                      | D.3     | 61.243.550           | 79.048.041           |
| Beban Barang dan Jasa                                 | D.4     | 888.596.958          | 978.058.268          |
| Beban Pemeliharaan                                    | D.5     | 534.080.938          | 491.515.441          |
| Beban Perjalanan Dinas                                | D.6     | 515.597.299          | 792.610.169          |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | D.7     | 682.100.326          | 721.319.229          |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                   |         | <b>2.681.619.071</b> | <b>3.062.551.148</b> |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>    |         | <b>3.442.688.351</b> | <b>1.697.059.916</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                       |         |                      |                      |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar             |         | 0                    | 0                    |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset                        |         | 2.612.000            | 5.645.000            |
| Pendapatan Pelepasan Aset                             |         | 7.552.000            | 5.645.000            |
| Beban Pelepasan Aset                                  |         | 4.940.000            | 0                    |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya |         | 0                    | 0                    |
| <b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | D.8     | 2.612.000            | 5.645.000            |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>         |         | <b>3.445.300.351</b> | <b>1.702.704.916</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                             |         | <b>3.445.300.351</b> | <b>1.702.704.916</b> |

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                  | CATATAN    | 2025                  | 2024                  |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                     | E.1        | 42.766.193.170        | 42.900.240.900        |
| SURPLUS/DEFISIT LO                                      | E.2        | 3.445.300.351         | 1.702.704.916         |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3        | 0                     | 0                     |
| KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS               | E.4        | 0                     | 25.587.113            |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                                  |            | 0                     | 0                     |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                |            | 0                     | 0                     |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                            |            | 0                     | 0                     |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI                  |            | 0                     | 25.587.113            |
| KOREKSI LAIN-LAIN                                       |            | 0                     | 0                     |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                 | E.5        | (3.246.080.037)       | (1.862.339.759)       |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                              |            | 199.220.314           | (134.047.730)         |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                    | <b>E.6</b> | <b>42.965.413.484</b> | <b>42.766.193.170</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### Profil dan Kebijakan Teknis

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN untuk tahun 2020-2025 yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Visi DJKN tersebut juga dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dimana DJKN merupakan

bagian dari Kementerian Keuangan itu sendiri.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Selain arah kebijakan nasional dan Kementerian Keuangan, untuk mendorong tercapainya Visi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga mempunyai Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024. Adapun Arah Kebijakan dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap

menjaga akuntabilitas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Lelang.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.

- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian

- 4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien  
Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
  - d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Implementasi Strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif

adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN. Implementasi Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sejak tahun 2018 penyusunan Laporan Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah didasarkan pada Aplikasi SAKTI yang telah melingkupi SAIBA dan SIMAK-BMN. Data dari SAKTI tersebut sudah terinterkoneksi dengan web e-rekon-lk yang digunakan sebagai dasar angka-angka dalam Laporan Keuangan ini.

Basis Akuntansi

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA

##### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Beban**

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran untuk ATR berupa peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
  - d. Pengeluaran untuk ATR berupa gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

#### Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**Ekuitas**

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih**

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian                                                                                                                                                        | Penyisihan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                                                                                            | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan                                                                            | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan                                                                              | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KMK.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun   |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrua  
l Pertama kali*

#### **(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua l Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dikenakan penambahan dana melalui mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 10 (sepuluh) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

| URAIAN                        | 2025                 |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                               | ANGGARAN             | ANGGARAN             | +/-               |
|                               | AWAL                 | SETELAH REVISI       |                   |
| <b>Pendapatan</b>             |                      |                      |                   |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | 6,131,859,422        | 6,131,859,422        | -                 |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>      | <b>6,131,859,422</b> | <b>6,131,859,422</b> | <b>-</b>          |
| <b>Belanja</b>                |                      |                      |                   |
| Belanja Barang                | 2,404,111,000        | 2,421,592,000        | 17,481,000        |
| Belanja Modal                 | 412,690,000          | 427,390,000          | 14,700,000        |
| <b>Jumlah Belanja</b>         | <b>2,816,801,000</b> | <b>2,848,982,000</b> | <b>32,181,000</b> |

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu total untuk belanja barang sebesar Rp17.481.000 dan untuk penambahan pagu belanja modal sebesar Rp14.700.000.

### Pendapatan

#### B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.131.859.422. Keseluruhan Pendapatan Negara berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Realisasi  
Pendapatan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp6.131.859.42  
2

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

| URAIAN                                                                                  | ESTIMASI<br>PENDAPATAN | REALISASI            | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                                           | 0.00                   | 7,552,000.00         | 0.00           |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                                            | 0.00                   | 0.00                 | 0.00           |
| Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan                                              | 0.00                   | 0.00                 | 0.00           |
| Pendapatan Jasa Lainnya                                                                 | 0.00                   | 0.00                 | 1.00           |
| Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I                                            | 1,627,965,000.00       | 3,637,899,798.00     | 2.23           |
| Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                                                         | 4,096,170,000.00       | 2,469,415,994.00     | 0.60           |
| Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara                                 | 165,000.00             | 12,091,221.00        | 73.28          |
| Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak | 0.00                   | 0.00                 | 1.00           |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah                                      | 0.00                   | 0.00                 | 1.00           |
| Pendapatan Anggaran Lain-Lain                                                           | 0.00                   | 4,900,409.00         | 1.00           |
| <b>Jumlah</b>                                                                           | <b>5,724,300,000</b>   | <b>6,131,859,422</b> | <b>107.12%</b> |
|                                                                                         |                        |                      |                |

*Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN        | 31 Desember 2025     | 31 Desember 2024     | KENAIKAN/ (PENURUNAN) |               |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|               | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)                  | %             |
| Pendapatan    | 6,131,859,422        | 4,791,715,268        | 1,340,144,154         | 27.97%        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>6,131,859,422</b> | <b>4,791,715,268</b> | <b>1,340,144,154</b>  | <b>27.97%</b> |

Realisasi Belanja

Rp2.429.481.755

**Belanja**

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.429.481.755 atau sebesar 85,26% dari anggaran belanja setelah Revisi sebesar Rp2.848.982.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025*

| KODE JENIS<br>BELANJA | URAIAN          | ANGGARAN<br>SETELAH<br>REVISI | REALISASI            | %             |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 51                    | Belanja Pegawai | 0                             | 0                    | 0.00%         |
| 52                    | Belanja Barang  | 2,421,592,000                 | 2,017,111,532        | 83.30%        |
| 53                    | Belanja Modal   | 427,390,000                   | 411,937,913          | 96.38%        |
| <b>Jumlah</b>         |                 | <b>2,848,982,000</b>          | <b>2,429,049,445</b> | <b>85.26%</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp484.707.314 atau sebesar 16,64% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

*Perbandingan Realisasi Belanja 2025 dan 2024*

| KODE JENIS BELANJA | URAIAN          | REALISASI            |                      | NAIK/(TURUN)         |                |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                    |                 | 2025                 | 2024                 | Rp                   | %              |
| 51                 | Belanja Pegawai | 0                    | 0                    | 0                    | 0.00%          |
| 52                 | Belanja Barang  | 2,017,111,532        | 2,328,687,759        | (311,576,227)        | -13.38%        |
| 53                 | Belanja Modal   | 411,937,913          | 585,069,000          | (173,131,087)        | -29.59%        |
| <b>Jumlah</b>      |                 | <b>2,429,049,445</b> | <b>2,913,756,759</b> | <b>(484,707,314)</b> | <b>-16.64%</b> |

## Belanja Pegawai Rp0 **B.2 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah dilaksanakan Uji Coba (*Piloting*) Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi pembayaran atas Gaji (beserta tunjangan yang melekat), Uang Muka/Persekot Gaji, Uang Makan dan Uang Lembur.

Sejak bulan Oktober 2020 pengelolaan belanja pegawai pada KPKNL Palu sudah tersentralisasi oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun 2025 dan 2024 sudah tidak ada anggaran belanja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN                         | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Belanja Gaji Pokok PNS         | 0                | 0                |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS    | 0                | 0                |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS  | 0                | 0                |
| Belanja Tunj. Anak PNS         | 0                | 0                |
| Belanja Tunj. Struktural PNS   | 0                | 0                |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS   | 0                | 0                |
| Belanja Tunj. PPh PNS          | 0                | 0                |
| Belanja Tunj. Beras PNS        | 0                | 0                |
| Belanja Uang Makan PNS         | 0                | 0                |
| Belanja Tunjangan Umum PNS     | 0                | 0                |
| Belanja Uang Lembur            | 0                | 0                |
| <b>Realisasi Belanja Bruto</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <i>Pengembalian Belanja</i>    | 0                | 0                |
| <b>Realisasi Belanja Netto</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Belanja Barang  
Rp2.017.111.532  
2

### B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.017.111.532 dan Rp2.328.687.759. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp311.576.227 atau 13,38% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN                                                   | 31 Desember 2025     | 31 Desember 2024     | NAIK/(TURUN)        |                |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                          |                      |                      | Rp                  | %              |
| Belanja Keperluan Perkantoran                            | 699.391.955          | 652.107.318          | 47.284.637          | 7,25%          |
| Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                        | 5.882.700            | 6.470.368            | -587.668            | 0,00%          |
| Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                 | 9.505.533            | 13.361.800           | -3.856.267          | -28,86%        |
| Belanja Honor Operasional Satker                         | 97.660.000           | 51.896.000           | 45.764.000          | 88,18%         |
| Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 | -                    | -                    | 0                   | #DIV/0!        |
| Belanja Bahan                                            | 11.726.100           | 60.526.970           | -48.800.870         | -80,63%        |
| Belanja Barang Operasional Lainnya                       | 49.604.560           | -                    | 49.604.560          | 100,00%        |
| Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   | 15.498.000           | 16.026.500           | -528.500            | -3,30%         |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                | 77.365.837           | 64.175.650           | 13.190.187          | 20,55%         |
| Belanja Langganan Listrik                                | -                    | 161.522.666          | -161.522.666        | -100,00%       |
| Belanja Langganan Telepon                                | -                    | 16.974.877           | -16.974.877         | -100,00%       |
| Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya                  | 798.610              | -                    |                     |                |
| Belanja Sewa                                             | -                    | 1.500.000            |                     |                |
| Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19                 | -                    | -                    | 0                   | 0,00%          |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                 | 265.279.730          | 281.906.206          | -16.626.476         | -5,90%         |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya         | 31.041.500           | -                    |                     |                |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin                   | 238.192.018          | 209.609.235          | 28.582.783          | 13,64%         |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 403.401.033          | 697.366.259          | -293.965.226        | -42,15%        |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 64.251.000           | 95.354.000           | -31.103.000         | -32,62%        |
| <b>Realisasi Belanja Bruto</b>                           | <b>1.969.598.576</b> | <b>2.328.797.849</b> | <b>-359.199.273</b> | <b>-15,42%</b> |

Belanja Modal  
Rp411.937.913

#### B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp411.937.913 sedangkan periode 31 Desember 2024 realisasi Belanja Modal sebesar Rp585.069.000. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp173.131.087 atau 29,59%.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN                                       | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   | NAIK (TURUN)<br>% |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 0                  | 0                  |                   |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin            | 411.937.913        | 585.069.000        | -29,59%           |
| Belanja Modal Gedung & Bangunan              | -                  | -                  | 0,00%             |
| <b>Jumlah Belanja</b>                        | <b>411.937.913</b> | <b>585.069.000</b> | <b>-29,59%</b>    |

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 Sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan pajak.

*Kas lainnya dan  
setara kas  
Rp1.296.450*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.296.450 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.020.787.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Pendapatan Yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0*

### C.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 Rp0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan Pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara.

Persediaan  
Rp17.356.628

### C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.356.628 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.234.341.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan

| Persediaan      | 31 DESEMBER 2025  | 31 DESEMBER 2024 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Barang Konsumsi | 17.356.628        | 1.234.341        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>17.356.628</b> | <b>1.234.341</b> |

Tanah  
Rp33.222.197.500

### C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.222.197.500 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp33.222.197.500. Saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah

| Klasifikasi                            | NUP | Luas    | Lokasi                             | Nilai                 |
|----------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah       | 1   | 3530 m2 | Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 , Palu | 19.011.571.000        |
| Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 2   | 814 m2  | Jl. D.I Panjaitan, Palu            | 2.153.844.000         |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah       | 2   | 4029 m2 | Jl. S. Parman, Palu                | 12.056.782.500        |
| <b>Jumlah</b>                          |     |         |                                    | <b>33.222.197.500</b> |

Peralatan dan  
Mesin  
Rp5.065.338.743

### C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp5.065.338.743 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.540.521.549. Terdapat mutasi bertambah pada peralatan dan mesin sejumlah Rp524.817.194

pada barang sebagai berikut antara lain: 1 (satu) unit kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp467.026.933, 1 (satu) unit minibus Rp341.990.000, 2 (dua) unit sepeda motor Rp56.000.000 dan 2 (dua) unit alat kantor lainnya sebesar Rp10.743.550, 5 (lima) unit meubilair sebesar Rp25.607.913, 13 (tiga belas) unit PC sebesar Rp138.430.565, dan 1 (satu) unit peralatan jaringan sebesar Rp5.935.550. Kemudian terdapat mutasi berkurang sebesar Rp520.917.317,- yang berasal dari penghentian penggunaan asset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Palu.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp9.804.889.588

### C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.804.889.588 dan Rp9.880.225.979. Mutasi berkurang sebesar Rp75.336.391 yang berasal dari penyelesaian Konstruksi Dalam Pekerjaan dan mutasi berkurang sebesar Rp0.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| Gedung dan Bangunan              | Saldo Per 31 Desember 2024 | Mutasi    |                   | Saldo 31 Desember 2025 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
|                                  |                            | Bertambah | Berkurang         |                        |
| Bangunan Gedung Kantor           | 6.044.270.730              | -         |                   | 6.044.270.730          |
| Bangunan Gudang                  | 463.478.000                |           |                   | 463.478.000            |
| Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga   | 6.865.000                  |           |                   | 6.865.000              |
| Bangunan Parkir Terbuka Permanen | 218.534.000                |           |                   | 218.534.000            |
| Bangunan Parkir Lainnya          | 95.857.000                 | -         |                   | 95.857.000             |
| Taman                            | 134.364.000                |           |                   | 134.364.000            |
| Rumah Negara Golongan I          | 248.510.000                |           |                   | 248.510.000            |
| Rumah Negara Golongan II         | 1.469.309.249              |           |                   | 1.469.309.249          |
| Pagar                            | 1.199.038.000              |           | 75.336.391        | 1.123.701.609          |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>9.880.225.979</b>       | <b>-</b>  | <b>75.336.391</b> | <b>9.804.889.588</b>   |

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp209.936.000

### C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp209.936.000 dan Rp209.936.000. Mutasi tambah dan berkurang sebesar Rp0.

*Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan*

| Gedung dan Bangunan | Saldo Per 31 Desember 2023 | Mutasi    |           | Saldo 31 Desember 2024 |
|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|
|                     |                            | Bertambah | Berkurang |                        |
| Jalan dan Jembatan  | 209.936.000                |           | -         | 209.936.000            |
| Jaringan            | -                          |           | -         | -                      |
| <b>Jumlah</b>       | <b>209.936.000</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>209.936.000</b>     |

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp0

### C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu yaitu berupa Buku Lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.940.000. Terdapat mutasi berkurang terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp5.354.304.975

### C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp5.354.304.975 dan Rp5.078.182.848.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

| Aset Tetap                  | 31 Desember 2025     | 31 Desember 2024     |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Peralatan dan Mesin         | 3.555.083.101        | 3.515.582.770        |
| Gedung dan Bangunan         | 1.620.776.274        | 1.405.148.078        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 178.445.600          | 157.452.000          |
| <b>JUMLAH</b>               | <b>5.354.304.975</b> | <b>5.078.182.848</b> |

Aset Lain-lain  
Rp0

### C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp267.945.000. Aset Lain-Lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu serta barang yang sedang dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi  
Penyusutan/  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp0

### **C.13 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp267.945.000. Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp1.296.450

### **C.14 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.296.450 dan Rp32.700.138. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Ekuitas  
Rp42.965.413.484

### **C.15 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 42.965.413.484 dan Rp 42.766.193.170. Ekuitas adalah Kekayaan Bersih Entitas yang merupakan Selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**Pendapatan Negara**  
**Bukan Pajak**  
**Rp6.124.307.422**

**D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.124.307.422 dan Rp4.759.611.064. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| NO            | URAIAN                                                                                           | 31 Desember 2025     | 31 Desember 2024     | KENAIKAN/ (PENURUNAN) |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|               |                                                                                                  | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)                  | %             |
| 1             | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)                                             | 0                    | 0                    | -                     | 0,00%         |
| 2             | Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesn                                                     | -                    | -                    |                       |               |
| 3             | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)                                            | -                    | -                    | -                     | 0,00%         |
| 4             | Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I (425782)                     | 3.637.899.798        | 2.776.281.255        | 861.618.543           | 31,03%        |
| 5             | Pendapatan Bea Lelang Pegadaian (425784)                                                         | 2.469.415.994        | 1.932.199.258        | 537.216.736           | 27,80%        |
| 6             | Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (425785)                                 | 12.091.221           | 35.981.640           | (23.890.419)          | -66,40%       |
| 7             | Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang berhak (425995) | -                    | -                    | -                     | 0,00%         |
| 8             | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah                                               | -                    | 9.513.514            | (9.513.514)           |               |
| 9             | Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)                                                           | 4.900.409            | 2.134.398            | 2.766.011             | 100,00%       |
| 10            | Pendapatan Jasa Lainnya (425699)                                                                 | -                    | 3.500.999            | (3.500.999)           | 0,00%         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                  | <b>6.124.307.422</b> | <b>4.759.611.064</b> | <b>1.364.696.358</b>  | <b>28,67%</b> |

**.Beban Pegawai**  
**Rp0**

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada bulan Oktober 2020, Belanja

Pegawai sudah diberlakukan sentralisasi yang menjadi tanggung jawab oleh Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun anggaran 2021 sudah tidak ada anggaran untuk belanja Pegawai di KPKNL Palu. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

| URAIAN JENIS BEBAN                               | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 | KENAIKAN/<br>(PENURUNAN) |              |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|                                                  |                  |                  | (Rp)                     | %            |
| Beban Gaji Pokok PNS                             | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS              | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                        | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS           | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS                      | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Pengembalian Belanja Beban Tunj. Suami/Istri PNS | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunj. Anak PNS                             | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunj. Struktural PNS                       | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunj. Fungsional PNS                       | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunj. PPh PNS                              | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunj. Beras PNS                            | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Uang Makan PNS                             | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Pengembalian Beban Uang Makan PNS                | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Tunjangan Umum PNS                         | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS            | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| Beban Uang Lembur                                | -                | -                | -                        | 0,00%        |
| <b>Jumlah</b>                                    | -                | -                | -                        | <b>0,00%</b> |

Beban Persediaan  
Rp61.243.550

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp61.243.550 dan Rp79.048.041. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk adalah sebagai berikut:

## Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN JENIS BEBAN             | 31 Desember 2025  | 31 Desember 2024  | NAIK (TURUN) %     |                |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                                |                   |                   | Rp                 | %              |
| Beban Persediaan Konsumsi      | 61.243.550        | 79.048.041        | -17.804.491        | -22,52%        |
| <b>Jumlah Beban Persediaan</b> | <b>61.243.550</b> | <b>79.048.041</b> | <b>-17.804.491</b> | <b>-22,52%</b> |

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp888.596.958

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp888.596.958 dan Rp978.058.268. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

## Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| URAIAN JENIS BEBAN                                       | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |          |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                          |                  |                  | (Rp)           | %        |
| Beban Keperluan Perkantoran                              | 699.001.955      | 652.107.318      | 46.894.637     | 7,19%    |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh                          | 5.882.700        | 6.470.368        | (587.668)      | 0,00%    |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                   | 8.425.033        | 13.946.800       | (5.521.767)    | -39,59%  |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja                     | 97.660.000       | 51.896.000       | 45.764.000     | 88,18%   |
| Beban Barang Operasional Lainnya                         | 49.604.560       | -                | 49.604.560     | 100,00%  |
| Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | -                | -                | -              | 0,00%    |
| Beban Bahan                                              | 11.726.100       | 60.526.970       | (48.800.870)   | -80,63%  |
| Beban Honor Output Kegiatan                              | -                | -                | -              | 0,00%    |
| Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi                  | -                | -                | -              | 0,00%    |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya                     | 15.498.000       | 16.026.500       | (528.500)      | -3,30%   |
| Beban Langgana Daya dan Jasa Lainnya                     | 798.610          | -                | 798.610        | 100,00%  |
| Beban Langganan Telepon                                  | -                | 16.852.275       | (16.852.275)   | -100,00% |
| Beban Langganan Listrik                                  | -                | 158.732.037      | (158.732.037)  | -100,00% |
| Beban Sewa                                               | -                | 1.500.000        | (1.500.000)    | 0,00%    |
| Belanja Modal BLU                                        | -                | -                | -              | 0,00%    |
| Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19                   | -                | -                | -              | 0,00%    |

**Beban****Pemeliharaan**

Rp534.080.938

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp534.080.938 dan Rp491.515.441. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN                             | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |        |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                |                  |                  | Rp             | %      |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 237.759.708      | 209.609.235      | 28.150.473     | 13,4%  |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 31.041.500       | 0                | 31.041.500     | 100,0% |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 265.279.730      | 281.906.206      | (16.626.476)   | -5,9%  |

**Beban Perjalanan****Dinas**

Rp515.597.299

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp515.597.299 dan Rp792.610.169. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN                | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   | NAIK (TURUN) %       |               |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                                   |                    |                    | Rp                   | %             |
| Beban Perjalanan Biasa            | 449.096.299        | 697.256.169        | (248.159.870)        | -35,6%        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 66.501.000         | 95.354.000         | (28.853.000)         | -30,3%        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>515.597.299</b> | <b>792.610.169</b> | <b>(277.012.870)</b> | <b>-34,9%</b> |

**Beban Penyusutan****dan Amortisasi**

Rp682.100.326

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp682.100.326 dan Rp721.319.229. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban

Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI           | 31 DESEMBER 2025   | 31 DESEMBER 2024   | NAIK (TURUN) % |         |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------|
|                                                  |                    |                    | (Rp)           | %       |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin             | 431.164.616        | 471.851.699        | - 40.687.083   | -8,6%   |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan             | 229.942.110        | 228.473.930        | 1.468.180      | 0,6%    |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan              | 20.993.600         | 20.993.600         | -              | 0,0%    |
| Beban Penyusutan Jaringan                        | -                  | -                  | -              | #DIV/0! |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan | -                  | -                  | -              | 0,0%    |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>                         | <b>682.100.326</b> | <b>721.319.229</b> | - 39.218.903   | -5,4%   |
| <b>Amortisasi</b>                                | <b>682.100.326</b> | <b>721.319.229</b> | - 39.218.903   | -5,4%   |

Surplus/Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp2.612.000

#### D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.612.000 dan Rp5.645.000. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| URAIAN                                                  | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |        |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                         |                  |                  | (Rp)           | %      |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya             | -                | -                | -              | 0,0%   |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya        | -                | -                | -              | 0,0%   |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | -                | -                | -              | 0,0%   |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar             | 2.612.000        | 5.645.000        | - 3.033.000    | 0,0%   |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>  | <b>2.612.000</b> | <b>5.645.000</b> | - 3.033.000    | -53,7% |

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp42.766.193.170*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.766.193.170 dan Rp42.900.240.900.

*Surplus/(Defisit) LO  
Rp3.445.300.351*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.445.300.351 dan Rp1.702.704.916, Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih atau kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi /  
Kesalahan  
Mendasar  
Rp -*

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Koreksi yang  
Menambah/  
Mengurangi Ekuitas  
Rp0*

### E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.587.113.

*Penyesuaian Nilai  
Aset  
Rp -*

### Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp.0*

### Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0*

### Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp0

### Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan sebesar Rp25.587.113.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp3.246.080.037

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp3.246.080.037) dan (Rp1.862.339.759).

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

| URAIAN                     | 2025            | 2024            | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------|
| TRANSAKSI ANTAR<br>ENTITAS | (3.246.080.037) | (1.862.339.759) | 1.383,740,278          | (74.3) |

Ekuitas Akhir  
Rp42.965.413.484

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.965.413.484 dan Rp42.766.193.170.

## PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Pada Tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu melakukan revisi melalui mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik yang merubah Pagu Anggaran maupun yang tidak merubah Pagu (pergeseran). Revisi dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 1/PB/2022 Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2025.

Revisi pertama, ketiga, kelima, keenam, kesembilan dan kesepuluh DIPA pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kewenangan Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Sulawesi Tengah yaitu Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Sedangkan Revisi kedua Kewenangan Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Sulawesi Tengah berupa penambahan volume keluaran pada RO peralatan fasilitas perkantoran, sedangkan revisi Keempat dan ketujuh DIPA pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Penambahan Pagu Anggaran untuk RO Aset Bun dan Optimalisasi Belanja Modal serta pemindahan PAGU antar kegiatan dan Revisi kedelapan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah porsi penyesuaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Palu TA 2025 setelah dilakukan revisi sebesar:

| Uraian                | 2025                 |                         |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
|                       | ANGGARAN AWAL        | ANGGARAN SETELAH REVISI | +/-               |
| <b>Belanja</b>        |                      |                         |                   |
| Belanja Pegawai       | 0                    | -                       | -                 |
| Belanja Barang        | 2.404.111.000        | 2.421.592.000           | 17.481.000        |
| Belanja Modal         | 412.690.000          | 427.390.000             | 14.700.000        |
| <b>Jumlah Belanja</b> | <b>2.816.801.000</b> | <b>2.848.982.000</b>    | <b>32.181.000</b> |